

Analisis *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021

Fitriani

e-mail : fitriani.180420047@mhs.unimal.ac.id

Muhammad Haykal,

Murhaban, Indrayani

*Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe
Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis *Flypaper Effect* pada PAD dan Dana Perimbangan terdiri dari DAU, DAK, DBH terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa dari Laporan APBD Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2020-2021, yang terdiri dari data realisasi PAD, dan Dana Perimbangan data realisasi Belanja Daerah yang diperoleh dari situs www.djpk.kemenkeu.go.id. Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Pemerintah Aceh Tahun 2020-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota dari Tahun 2020-2021. Metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan Regresi Linier Berganda, data diolah dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social Science) 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, PAD, DAK, dan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah sedangkan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dan terjadi *Flypaper Effect* pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di provinsi Aceh Tahun 2020-2021.

Kata kunci: PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Daerah, *Flypaper Effect*

Abstract

This study aims to analyze the *Flypaper Effect* on PAD and Balancing Funds consisting of DAU, DAK, DBH on Regional Expenditures in District/City Governments in Aceh Province in 2020-2021. The data collected in this study is secondary data in the form of the 2020-2021 Aceh Provincial Government APBD Report, which consists of PAD realization data, and Balancing Funds Regional Expenditure realization data obtained from the website www.djpk.kemenkeu.go.id. The population in this study are districts/cities in the Government of Aceh for 2020-2021. The population in this research is 33 regencies/cities in Aceh Province consisting of 18 regencies and 5 cities from 2020-2021. The data analysis method was carried out using Multiple Linear Regression, the data was processed using the SPSS (Statistical Package for Social Science) 25.0 program. The results showed that partially, PAD, DAK, and DBH had no significant effect on Regional Expenditure while DAU had a positive effect and significant impact on Regional Expenditures and the *Flypaper Effect* occurred in District/City Governments in the province of Aceh in 2020-2021.

Keywords: PAD, DAU, DAK, DBH, Regional Expenditure, *Flypaper Effect*

PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah ditandai dengan desentralisasi fiskal yang menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri secara otonom. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat (Haryani, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 buat melaksanakan kewenangan pemda (Pemerintah Daerah), pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi khusus (DAK), Dana Alokasi umum (DAU), serta bagian daerah dari Dana Bagi hasil (DBH) yang terdiri dari sumber daya alam serta pajak. Selain itu, sumber pendanaan lainnya berupa Pendapatan asli daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain lain (Indah Ningsih, 2021).

Pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang pada alokasikan menggunakan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah pada rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi umum (DAU) di berikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di kumpulkannya. Pengembangan suatu daerah bisa pada sesuaikan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan potensi serta ciri khas antar daerah. Hal ini dievaluasi menjadi suatu kesempatan yang sangat baik serta artinya salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pemda untuk membuktikan kemampuannya. Pada hal ini Pemerintah Daerah wajib lebih berkonsentrasi di pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal, jika peningkatan ekonomi lokal lebih cepat terwujud maka di akhirnya bisa menaikkan kinerja keuangan daerah.

Karakteristik kemandirian daerah bisa ditinjau dari pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki oleh setiap wilayah, tetapi masih banyak wilayah yang masih menggantungkan sumber pendanaan wilayahnya di dana transfer. Perbandingan proporsi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) terhadap penerimaan daerah masih cukup lebih tinggi bila dibandingkan menggunakan penerimaan wilayah lainnya, termasuk pendapatan asli daerah (PAD). Dana perimbangan ini bisa mengakibatkan banyak sekali pertarungan yang bisa dipandang asal segi perbedaan antara pemerintah pusat serta wilayah pada tahu fungsi dana perimbangan dimana pemerintah pusat mentransfer dana untuk menyamaratakan keuangan antar daerah. Sedangkan dari pemda memahami pemberian transfer dana ini menggunakan tujuan buat mencukupi kebutuhan daerah (Suardana, 2018).

Fenomena utama dalam penelitian ini adalah *flypaper effect*, yaitu perbedaan dalam pola pengeluaran yang bergantung dari sumber pendapatan, yaitu sumber pendapatan yang berasal dari usaha sendiri (PAD) dengan pendapatan yang diberikan pihak lain seperti transfer (Dana Perimbangan). Atau dengan kata lain *flypaper effect* merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana perimbangan yang

diprosikan dengan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) untuk kepentingan belanja daerah daripada menggunakan pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah dijadikan salah satu tolak ukur pada pelaksanaan otonomi wilayah sebab bisa menaikkan kemandirian daerah. Kemandirian daerah menunjukkan bahwa kemampuan pemda dalam membiayai sendiri aktivitas pemerintah, pembangunan, serta pelayanan pada warga. Kemandirian daerah pula mendeskripsikan taraf partisipasi masyarakat pada pembangunan daerah yang atinya semakin mandiri suatu daerah maka meningkat partisipasi warga pada membayar pajak serta retribusi daerah serta hal tadi tentu menambah pemasukan bagi pemerintah daerah menjadi pendapatan asal daerah itu sendiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Stewardship theory

Teori *Stewardship* menggambarkan situasi dimana pengelolaan dalam pemerintah lebih mementingkan tujuan kepentingan organisasi dan pasti tidak termotivasi kepentingan individu. Teori tersebut menjelaskan bahwa ada keterkaitan yang erat antara kepuasan dan pencapaian keberhasilan dalam organisasi. Pencapaian keberhasilan dalam organisasi menunjukkan maksimalisasi utilitas gabungan *orincipal* dan *management*. Upaya dalam mengoptimalkan fungsi gabungan ini hasil keputusannya akan mengembangkan relevansi personal yang ada dalam gabungan. Suatu negara tentu saja membutuhkan peraturan, tidak memungkinkan jika suatu negara berdiri tanpa adanya aturan. Alasan dasar adanya aturan di suatu negara karena terdapat ketidakseimbangan relevansi, maka dari itu untuk menyelaraskan perbedaan inilah peraturan disusun sebagaimana mestinya agar tingkah laku manusia dapat terkendali (Astuti, 2017).

Teori *Stewardship* memberikan pandangan bahwa di dalam sebuah organisasi yang kuat terdapat kepuasan pemilik. Pemerintah akan bekerja semaksimal mengemban amanah agar sampai pada tujuan pemerintah yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat. Akuntansi sebagai alat utama informasi keuangan (*driver*), seiring berkembangnya transaksi yang semakin canggih dan didorong dengan berkembangnya pendalaman dalam akuntansi serta pertumbuhan lembaga sektor publik. Keterlibatan teori *stewardship* dalam riset ini menjelaskan keberadaan pemda sebagai lembaga yang dapat diandalkan, dapat menerima aspirasi masyarakat, memaksimalkan pelayan yang terbaik kepada publik serta mempertanggungjawabkan keuangan sehingga target ekonomi dapat terwujud dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal (Astuti, 2017).

Belanja Daerah

Pengertian Belanja Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah yaitu belanja kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama

antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu akan berbeda-beda tergantung kepada seberapa besar potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah serta kemampuan untuk menggali dan mengelola sumber daya alam tersebut. Sumber utama dalam komponen pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah karena pajak dan retribusi daerah merupakan bagian dari pendapatan yang strategis untuk daerah yang digunakan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan.

Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu. Dana perimbangan memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Alokasi Umum

Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum juga merupakan dana hibah murni (grants) dari pemerintah pusat yang berwenang dalam penggunaan dana tersebut diserahkan penuh kepada pemerintah daerah dengan segala pertimbangan serta sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan (Rianti, 2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2006 memberikan prioritas pemanfaatan dana alokasi umum berupa untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai serta kesejahteraan pegawai

dan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan serta untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat (Jannah, 2020). Dana alokasi umum (DAU) bersifat *block grant*, maksudnya adalah pemerintah daerah dapat menggunakan dana alokasi umum sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menjalankan otonomi daerah (Fadilah & Helmayunita, 2020).

Dana Alokasi Khusus

Pengertian Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat (23) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional (Astuti, 2017). Dana Alokasi Khusus juga digunakan untuk membangun sarana dan prasarana fisik daerah seperti pembangunan dan rehabilitas yang apabila dikelola dengan baik dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing.

Dana Bagi Hasil

Pengertian Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah berdasarkan persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil yaitu bagian anggaran APBN yang nantinya akan dibagikan kembali untuk wilayah dengan persentase tertentu. Tujuan Dana Bagi Hasil yaitu memulihkan keselarasan antara pusat dan daerah dengan melihat kapasitas wilayah penghasil. Pembagian dana bagi hasil dari pusat menuju daerah provinsi dan kabupaten/kota tercantum di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Ernayani et al., 2017).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Septinayu Dwi Putri & ikhsan Budi Riharjo (2018) dengan judul *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini telah mendukung semua hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sehingga *Flypaper effect* terjadi pada Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2012 sampai dengan 2015, hal ini dapat diketahui dengan nilai koefisien Dana Alokasi Umum lebih besar dari pada koefisien Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahriar Abdullah & Listia Riani (2020) dengan judul *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil

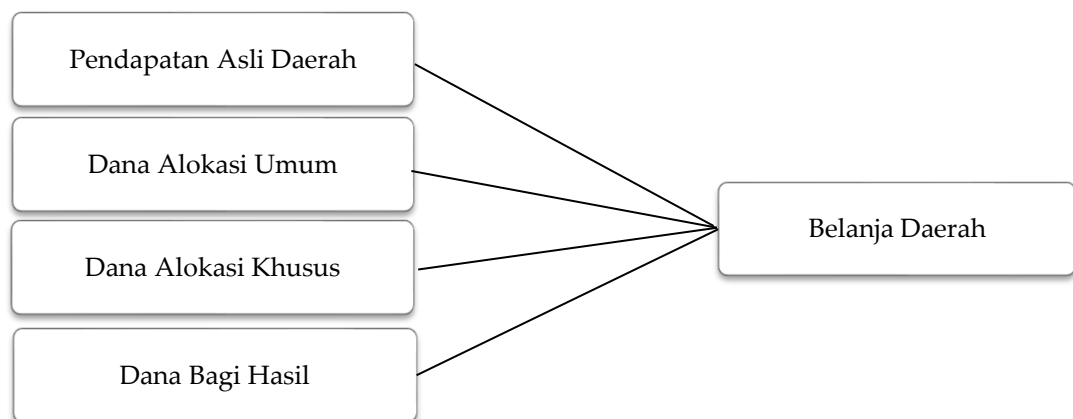
analisis Regresi sederhana menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil Regresi Berganda menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun lalu Berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah tahun berjalan dan terjadi *Flypaper effect* pada Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sehingga berdampak pada penurunan kinerja keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Ningsih, Anik Malikhah & Siti Aminah Anwar (2021) dengan judul Analisis *Flypaper Effect* dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya fenomena *Flypaper effect* pada Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli daerah, serta Satuan Kerja perangkat Daerah secara signifikan mempengaruhi Belanja Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Dwi April Rianti & Kurnia (2020) dengan judul Pengaruh *Flypaper Effect* Pada PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Namun pada Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. *Flypaper Effect* tidak terjadi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2014-2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Haris Fadilah & Nayang Helmayunita (2020) dengan judul Analisis *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan pemaparan kerangka pemikiran maka hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan terjadi *Flypaper Effect* Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021.

H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan terjadi *Flypaper Effect* Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021.

H₃ : Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan terjadi *Flypaper Effect* Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021.

H₄ : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja daerah dan terjadi *Flypaper Effect* Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021.

METODELOGI PENELITIAN

Objek dan Lokasi Penelitian

Hasil pengujian dari penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Objek penelitian adalah aspek yang ingin diteliti dalam penelitian, yang menjadi objek penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) serta Belanja Daerah. Lokasi dalam penelitian ini yaitu pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah sekumpulan orang, kejadian, sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Jemmy Rumengan, Muammar Khadafi, Sri Yanti, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, dengan populasi sejumlah 18 Kabupaten dan 5 Kota dengan penelitian selama (dua) tahun yaitu tahun 2020 dan 2021.

Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi atau wakil populasi yang diteliti dan diambil sebagai sumber data serta dapat mewakili seluruh populasi (Jemmy Rumengan, Muammar Khadafi, Sri Yanti, 2020). Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *Full sampling* atau teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2018). Dengan kata lain sampling jenuh bisa disebut dengan sensus, dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Data yang digunakan yaitu seluruh Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, pada 18 Kabupaten dan 5 Kota selama 2 tahun (2020-2021).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana menurut (Sugiyono,2018) Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalkan lewat orang lain atau lewat dokumen. Data diperoleh melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau www.djpk.kemenkeu.go.id .

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif dan Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Metode analisis data yang dipakai menggunakan analisis regresi linier berganda dan analisis *flypaper effect*. Uji hipotesis menggunakan uji t dan nilai R^2 (koefisien determinasi).

PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Pengujian statistic deskriptif digunakan untuk memberikan informasi gambaran umum dari tiap variable penelitian. Analisis statistic deskriptif memberikan gambaran suatu data dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi dari masing-masing variable penelitian. Berikut ini tabel 1 yang menjelaskan tentang hasil pengujian statistic dalam penelitian ini.

Tabel 1
Hasil Deskriptif Statistik Variabel
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	46	46,17	227,75	121,0613	55,60672
DAU	46	313,86	897,98	530,1080	165,99785
DAK	46	27,85	150,03	79,6274	32,06009
DBH	46	11,48	127,46	29,7180	28,14577
BD	46	605,30	2398,34	1213,1580	442,15570
Valid N (listwise)	46				

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 1 diatas ini, tentang pengujian statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) dari penelitian ini adalah 46. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah 46,17 M dan yang terbesar adalah 222,75 M. Rata-rata variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh adalah sebesar 121,0613 M dengan standar deviasi sebesar 55,60672 M. Pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah sebesar 313,86 M dan yang terbesar adalah sebesar 897,98 M. Rata-rata variabel Dana Alokasi Umum Kabupaten/kota pada Provinsi Aceh adalah sebesar 530,1080 M dengan standar deviasi sebesar 165,99785 M. Pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah sebesar 27,85 M dan nilai yang terbesar adalah sebesar 150,03 M. Rata-rata variabel Dana Alokasi Khusus Kabupaten/kota pada Provinsi Aceh adalah sebesar 79,6274 M dengan standar deviasi sebesar 31,06009 M. Pada variabel Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah sebesar 11,84 M dan yang terbesar adalah sebesar 127,46 M. Rata-rata variabel Dana Bagi Hasil Kabupaten/kota pada Provinsi Aceh adalah sebesar 29,7180 M dengan standar deviasi sebesar 28,14577 M. pada variabel Belanja Daerah (BD) menunjukkan bahwa nilai yang terkecil adalah sebesar 605,30 M dan nilai yang terbesar adalah sebesar 2.398,34 M. Rata-rata variabel Belanja Daerah Kabupaten/kota pada Provinsi Aceh adalah sebesar 1.213,1580 M dengan standar deviasi sebesar 442,15570 M.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh factor yang digunakan dalam model penelitian yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh secara linier. Hasil dari analisis regresi linier berganda Nampak pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta	t		
1 (Constant)	-150,778	65,721		-2,294	,027	
PAD	-,037	,592	-,005	-,062	,951	,334
DAU	2,571	,235	,965	10,932	,000	,238
DAK	,215	,772	,016	,278	,782	,591
DBH	-,398	,743	-,025	-,536	,595	,829

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 2 dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -150,778 - 0,037.PAD + 2,571.DAU + 0,215.DAK - 0,398.DBH + e$$

Berdasarkan pada model persamaan regresi pada Tabel 2, dapat diinterpretasikan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Konstanta (α), konstanta merupakan intersep variabel terikat jika variabel bebas = 0, hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang digunakan dalam model penelitian sebesar konstanta tersebut. Besarnya nilai konstanta adalah -150,778 menunjukkan bahwa jika variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan variabel Dana Bagi Hasil = 0 atau konstan, maka variabel Belanja Daerah akan sebesar -150,778;
- 2) Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah bernilai negatif sebesar (-0,037) berarti apabila nilai PAD mengalami kenaikan 1%, maka akan menurunkan Belanja Daerah sebesar 0,037% dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- 3) Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) bernilai positif sebesar 2,571 berarti apabila nilai DAU mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 2,571% dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- 4) Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus (DAK) bernilai positif sebesar 0,215 berarti apabila nilai DAK mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,215% dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- 5) Koefisien regresi Dana Bagi Hasil (DBH) bernilai negatif sebesar (-0,398) berarti apabila nilai DBH mengalami kenaikan 1%, maka akan menurunkan Belanja Daerah sebesar 0,398 % dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil Uji Normalitas dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Asymp sig (2-tailed)* sebesar $0,100 > 0,05$, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Dari hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa besarnya nilai *Variance Influence Faktoc (VIF)* pada seluruh variabel independen lebih kecil dari 10, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berarti model yang digunakan dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas dari multikolinearitas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi tidak kesamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil pengujian heteroskedastisitas, didapat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil estimasi regresi linier berganda layak digunakan untuk interpretasi dan analisa lebih lanjut.

Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi pada persamaan tersebut terjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Hasil pengujian statistic, menunjukkan angka *Durwin Watson (DW)* sebesar 1,785. Nilai tersebut berada diantara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji t

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel nilai perusahaan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil pengujian t yang disajikan pada Tabel 3 .

Berdasarkan hasil pengujian uji t pada Tabel 3 dibawah ini, diperoleh tingkat signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ (*level of significant*)

Tabel 3
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-150,778	65,721		-2,294	,027	
PAD	-,037	,592	-,005	-,062	,951	,334

DAU	2,571	,235	,965	10,932	,000	,238
DAK	,215	,772	,016	,278	,782	,591
DBH	-,398	,743	-,025	-,536	,595	,829

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 3 diatas, diketahui bahwa T_{tabel} adalah sebesar 2,019541. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari hasil uji t, bahwa Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ didapat nilai t_{hitung} sebesar $-0,062 < t_{\text{tabel}} 2,019541$ dengan $\text{sig. } 0,951 > \text{sig. } \alpha = 0,05$. Maka Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, jadi dapat disimpulkan bahwa H^1 **ditolak**.
2. Dari hasil uji t, bahwa Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ didapat nilai t_{hitung} sebesar $10,932 > t_{\text{tabel}} 2,019541$ dengan $\text{sig. } 0,000 < \text{sig. } \alpha = 0,05$. Maka Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, jadi dapat disimpulkan bahwa H^2 **diterima**.
3. Dari hasil uji t, bahwa Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ didapat nilai t_{hitung} sebesar $0,278 < t_{\text{tabel}} 2,019541$ dengan $\text{sig. } 0,782 > \text{sig. } \alpha = 0,05$. Maka Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, jadi dapat disimpulkan bahwa H^3 **ditolak**.
4. Dari hasil uji t, bahwa Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah dengan tingkat $\text{sig. } \alpha = 0,05$ didapat nilai t_{hitung} sebesar $-0,536 < t_{\text{tabel}} 2,019541$ dengan $\text{sig. } 0,595 > \text{sig. } \alpha = 0,05$. Maka Dana Bagi Hasil secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, jadi dapat disimpulkan bahwa H^4 **ditolak**.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil dari Koefisien Determinasi dapat dilihat pada *Adjusted R Square*.

Tabel 4
Adjusted R Square
Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	,961 ^a	,924	,917	127,67092	,924	124,683	4

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Dari tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,917. Dapat diartikan bahwa kemampuan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil dalam mempengaruhi variabel Belanja Daerah sebesar 91,7% ($0,917 \times 100\%$), sementara sisanya 8,3% ($100\% - 91,7\%$), dikontribusi oleh factor lain diluar model penelitian atau variabel-variabel yang lainnya dan tidak termasuk didalam variabel penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan tentang Analisis *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021. Artinya bahwa daerah yang mendapatkan Pendapatan Asli Daerah relatif kecil, sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap Belanja Daerah, dikarenakan porsinya Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil digunakan dalam membiayai Belanja Daerah, realitanya menunjukkan yang terjadi bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat besar digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja lainnya.
2. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021. Artinya semakin tinggi tingkat Dana Alokasi Umum, akan semakin meningkatkan Belanja Daerah. Kondisi ini memperlihatkan Pemerintah Daerah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat dan mengganggu peningkatan belanja, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan.
3. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021. Artinya Dana Alokasi Khusus bukanlah faktor yang mempengaruhi perubahan Belanja Daerah. Hal ini dapat terjadi karena Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang nilainya relatif kecil dan hanya di gunakan untuk mendanai kebutuhan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional.
4. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa secara parsial Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021. Artinya bahwa Dana Bagi Hasil yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/kota di Aceh sangat sedikit, ini dikarenakan Dana Bagi Hasil Aceh sebagian besar berasal dari sektor migas, penurunan penerimaan Dana Bagi Hasil ini disebabkan oleh penurunan produksi migas dan lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. (2020). *Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Widya Ganecwara*, 10(4). <https://doi.org/10.36728/jwg.v10i4.1216>
- Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2017). *Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 77–91. <https://doi.org/10.21002/jepi.v18i1.773>
- Astuti, L. D. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 77–91. <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>
- Dewi, K. R., Kepramareni, P., & Novita, N. L. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Bali Periode Tahun 2012-2015*. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Ekawarna, S. U. (2017). *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi)*. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(3), 2338–4603.
- Ernayani, R. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)*. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(1), 43–52.
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). *Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3144–3159. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.273>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IMB SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryani. (2017). *Analisis Flypaper Effect pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(2), 133–140.

- Indah Ningsih, A. M. dan S. A. A. (2021). **Analisis Flypaper Effect dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019.** E-JRA Vol. 10 No. 07 Februari 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Istiqomah, M., Amran. (2021). **Analisis Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten / Kota Bali dan Nusa Tenggara.** *Media Ekonomi*, 29(1), 37–52.
- Jannah, H. (2020). **Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah.** *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(12), 1–19.
- Jemmy Rumengan, Muammar Khadafi, Sri Yanti, dan A. S. (2020). *Metodologi Penelitian*. CV. SEFA BUMI PERSADA.
- Kurniawan, R., Ratnanto, S., & Widodo, D. W. (2019). **Analisis Flypaper Effect Dana Transfer & PAD Terhadap Belanja Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur.** *Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (SENMEA) IV Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri*, 95–102.
- Melda, H., & Syofyan, E. (2020). **Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.** *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2826–2838. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.252>
- Putri, B. septianayu D. (2018). **Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah.** *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(2), 1–16. <https://doi.org/10.32662/gaj.v2i2.615>
- Rianti, I. D. A. (2020). **Flypaper Effect Pada DAU, DAK, PAD Terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.** *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 9(10), 1–21.
- Suardana, N. M. A. A. dan K. A. (2018). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada Belanja Daerah.** *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25, 877–904.
- Wahidahwati, D. A. dan. (2017). **Flypaper Effect Pada DAU, DAK Dan PAD Terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.** *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 1–20.

www.djpk.keumenkeu.go.id